



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 2

SAMA-SAMA DATANGI GEDUNG DEWAN Transportasi Online Timbulkan Pro Kontra

YOGYA (KR) - Kebijakan terkait transportasi online yang akan digulirkan Pemda DIY menimbulkan sikap pro maupun kontra di masyarakat. Kedua belah pihak itu pun sama-sama mendatangi gedung DPRD Kota Yogya pada waktu yang berbeda guna menyalurkan aspirasinya.

Ketua Komunitas Pengemudi Taksi Argo Yogyakarta, Sutiman, mengungkapkan kehadirannya di gedung dewan tersebut guna meminta klarifikasi atas pernyataan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto.

"Kami menilai, anggota dewan itu seakan tidak setuju dengan pelarangan taksi plat hitam yang dijalankan melalui aplikasi online. Selama ini, kami pengemudi taksi plat kuning berango sudah berjuang dan selangkah lagi akan terbit Pergub DIY," paparnya saat di gedung DPRD Kota Yogya, Senin (13/3).

Sutiman menambahkan, pihaknya juga tidak pernah menolak kehadiran aplikasi online. Namun hal itu harus ditempatkan pada hal yang lebih tepat. Salah satunya ialah dengan mewadahi taksi plat kuning yang merupakan moda transportasi resmi dan me-

ngantongi izin dari pemerintah.

Apalagi imbuhnya, dari 22 perusahaan taksi di Yogya, jumlah armadanya dibatasi seribu unit. Sedangkan transportasi online berplat hitam bisa tidak terbatas lantaran tidak melalui izin operasional hingga uji kelayakan. "Jangan sampai yang tidak resmi ini justru didukung," imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Rifki Listianto, menjelaskan seperti dimuat *KR*, Minggu (12/3), munculnya angkutan umum berbasis online dikarenakan respons yang lambat dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat tentang transportasi umum maupun kebutuhan lapangan kerja. Kehadirannya juga terbukti menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran, khususnya bagi pengemudi ojek sepeda motor.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika tiba-tiba langsung dilarang, termasuk roda dua, maka hal itu dinilainya tidak fair. "Masyarakat berhak atas transportasi yang mudah dan nyaman. Ketika pemerintah belum bisa menghadirkan itu, kemudian ada swasta yang memiliki inovasi, maka ini lah bentuk ekonomi kreatif. Ada ribuan pengemudi sepeda motor yang bergantung

di sana. Justru pemerintah seharusnya menjembatani dengan regulasi yang belum ada aturannya itu," urainya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDIP Kota Yogya, Fokki Ardianto, mengatakan polemik taksi konvensional dan taksi

online harus dikembalikan ke UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan itu dijelaskan, penegakan menjadi ranah kepolisian dan pengembangannya di pemerintah tingkat pusat hingga daerah.

"Kita harus berpikir, mulai sama-sama mendorong wujudkan transportasi publik yang mudah aksesnya. Kemudian saling terintegrasi sehingga semua pihak mampu terwadahi," terangnya usai menemui pengemudi transportasi online. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005